KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

EGRS4R93

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 3 6 8 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan						
A. IDENTIT	AS PENERIMA PENGI	HASILAN	YANG DIPOTONG			•		
A.1 NPWP : 68 807 563 9 722 000								
A.2 NIK								
A.3 Nama : SUDARMADI								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PA	INODE OBCERT	AJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01		1.102.300	1.102.300	0	5	55.115	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 037/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy								
PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomo	Nomor : Tanggal							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
3.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5		0 0 0			
C.2 Nama	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi :]		
C.4 Tanggal :		1 3 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :		HARI JUMADI						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :		Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
[] 6 8 8 8 8 8			Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	x mengatur bahwa d	okumen ini tela	ah ditandatangani secara	